

PERAN IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA (IPI) PROVINSI RIAU DALAM MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PUSTAKAWAN

Vivi Avilia

Ilmu Perpustakaan, Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning
Email: aviliavivi23@gmail.com

Vita Amelia

Ilmu Perpustakaan, Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning
Email: vita.amelia@unilak.ac.id

Hadira Latiar

Ilmu Perpustakaan, Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning
Email: hadiralatiar6@gmail.com

Abstrak

Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau adalah salah satu organisasi yang menunjang kualitas sumber daya manusia dalam profesi pustakawan, dengan adanya organisasi profesi pustakawan dapat membantu pustakawan dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau dalam Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pustakawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pengurus serta anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau dengan berpatokan pada tiga indikator yaitu (1) Kegiatan Ilmiah, (2) Pendidikan dan Pelatihan, serta (3) Program Riau Pintar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari ketiga indikator program kerja, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau belum melaksanakan kegiatannya dengan baik. Pada Indikator Kegiatan Ilmiah, IPI Provinsi Riau sudah melakukan 5 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan. Pada Indikator Pendidikan dan Pelatihan, IPI Provinsi Riau sudah melakukan 1 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan. Pada Indikator Program Riau Pintar, IPI Provinsi sudah melakukan 1 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau dalam Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pustakawan belum terlaksanakan dengan maksimal.

Kata Kunci : Peran, Pustakawan, Kualitas, Sumber Daya Manusia, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau.

Abstract

The Indonesian Librarian Association (IPI) Organization of Riau Province is one of the organizations that support the quality of human resources in the librarian profession, with the existence of a professional librarians organization can help librarians in improving library management to the maximum. This study aims to determine how the Role of the Indonesian Librarian Association (IPI) of Riau Province in Developing the Quality of Librarian Human Resources. The method used in this research is descriptive qualitative research method. This research was conducted by interviewing the management and members of the Riau Province Indonesian Librarian Association (IPI) based on three indicators, namely (1) Scientific Activities, (2) Education and Training, and (3) Riau Smart Program. The results of the interviews show that of the three work program indicators, the Indonesian Librarian Association (IPI) of Riau Province has not carried out its activities properly. In the Scientific Activity Indicator, IPI of Riau Province has conducted 5 activities that lead to the development of librarians' human resources. In the Education and Training Indicator, IPI of Riau Province has conducted 1 activity that leads to the development of librarian's human resources. In the Riau Smart Program Indicator, the Provincial IPI has carried out 1 activity that leads to the development of library human resources. So it can be concluded that the role of the Indonesian Librarian Association (IPI) of Riau Province in Developing the Quality of Librarian's Human Resources has not been carried out to the maximum.

Keywords: Role, Librarian, Quality, Human Resources, Indonesian Librarian Association (IPI) of Riau Province.

A. PENDAHULUAN

Peranan di sebuah organisasi sangatlah penting, apalagi organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan seluruh pustakawan dalam menyatakan wujud adanya suatu profesi pustakawan yang akan mengelola dan membina sumber daya manusia serta perangkat perpustakaan dengan baik. Organisasi ini telah melakukan beberapa kegiatan yang sangat berguna untuk meningkatkan keahlian pustakawan, serta tersedia forum untuk berdiskusi dalam pengembangan perpustakaan.

Menurut pasal 34 ayat 1-4 UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan sudah jelas diatur tentang organisasi profesi yang mengatakan pustakawan membentuk organisasi profesi, yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan, setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi,

pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perpustakaan : Pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan demikian dua hal yang menjadi kriteria dasar seorang pustakawan adalah bahwa 1) yang bersangkutan telah menempuh pendidikan kepustakawanan; 2) dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang perpustakaan.

Peran Ikatan Pustakawan Indonesia sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia terutama para pustakawan, organisasi ini dibentuk untuk mengarahkan para pustakawan bagaimana caranya mengelola perpustakaan dengan baik, penyedia informasi, dan mengembangkan ilmu perpustakaan. Maka dari itu peran Ikatan Pustakawan Indonesia sangat berkaitan kepada pustakawan karena membantu seluruh pustakawan dalam menambah ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan keahlian yang nanti ujungnya dapat berdampak kepada pengelolaan perpustakaan yang baik.

Kualitas sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting di sebuah organisasi. Jika ingin memajukan suatu perpustakaan maka kualitas sumber daya manusia khususnya para pustakawan yang harus dibentuk secara matang agar menjadi pustakawan yang cerdas dan berkompetensi, kualitas sumber daya manusia ini sangatlah menunjang dalam kemajuan keahlian yang membuat pustakawan berpikir luas akan informasi dan mencerdaskan bangsa. Dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia maka pustakawan akan terlatih dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 6 Juli 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung

dalam APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia. Mereka ini adalah Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).

Dalam Kongres Pustakawan Indonesia tahun 1973 tersebut, ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu (1) seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, dan (2) pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhir, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI, melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI. (Laporan Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia PD (IPI) Provinsi Riau, 2018, p.1).

Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Pemilihan untuk pengurus pusat, yang didahului dengan penyampaian tata tertib pemilihan, menghasilkan a.l. ketua Soekarman, sekretaris J.P. Rompas, dan bendahara Yoyoh Wartomo. Komisi yang terbentuk di antaranya adalah Komisi Perpustakaan Nasional yang diketuai oleh Mastini Hardjoprakoso, Perpustakaan Khusus oleh Luwarsih Pringgoadisurjo (alm.) dan Pendidikan Pustakawan oleh Sjahrial Pamuntjak. Pada tanggal 7 Juli 1973 itu juga Anggaran Dasar IPI yang terdiri dari 24

pasal disahkan oleh peserta Kongres. Seiring dengan terbentuknya organisasi Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia di Ciawi, keberadaannya terus berkembang hingga ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk juga Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau. Tujuan IPI Provinsi Riau yaitu meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan Negara, dan memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota. (Laporan Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia PD (IPI) Provinsi Riau, 2018).

Tujuan organisasi IPI menurut AD/ART IPI pasal 8 untuk mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memberikan perlindungan profesi kepada anggota (Rumani, 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukannya sebuah penelitian tentang Peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau sebagaimana hal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpustakaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau dalam Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pustakawan". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pembaca tentang peran sebuah organisasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia pustakawan, khususnya dalam perpustakaan Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

1. Peran

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Dwi, 2016). Kemudian menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya (Satria, 2016)

2. Pustakawan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan atau ahli perpustakaan. Kemudian menurut kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia dikatakan bahwa yang disebut pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Selanjutnya jabaran kamus istilah perpustakaan karangan Lasa, H.S. Librarian-pustakawan, penyaji informasi adalah tenaga profesional dan fungsional di bidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi.

3. Ikatan Pustakawan Indonesia

IPI lahir pada 6 Juli 1973, artinya sudah 37 tahun usia yang cukup matang untuk membangun dirinya, lingkungannya dan bangsanya, oleh karena itu sesuai amanah UU Nomor 43 Tahun 2007. Pasal 34 ayat 1 Pustakawan membentuk organisasi profesi, dan pustakawan harus menjadi anggota organisasi profesi (ayat 3). Ada 3 tahapan IPI : pertama, meningkatkan profesionalitas pustakawan; membangun ilmu perpustadokinfo; mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan ilmu pustakawan bagi bangsa dan negara RI (Rimbarawa,2010).

Ikatan pustakawan Indonesia adalah sebuah organisasi wadah interaksi pustakawan terbesar di Indonesia dan menjadi 'induk' dari berbagai ikatan dan asosiasi yang lahir berikutnya seperti FPPTI, APISI, ISIPII, FPSI dan lain-lain. Maka

sudah sewajarnya jika organisasi ini dituntut untuk menjadi profesi yang dijalankan dengan ideal (Sudarsono, 2009).

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk melaksanakan proses pelayanan kepada masyarakat, yang menyangkut kesiapan kerja, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Pelaksanaan pemerintah yang baik, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan dukungan kesiapan aparatur yang mantap. Isu yang muncul terkait dengan otonomi daerah adalah bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dilihat dari sumber daya manusia aparatnya mampu mewadahi aktivitas pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan. Banyak daerah yang mengakui bahwa kemampuan sumber daya manusia aparaturnya masih perlu ditingkatkan (Dwiyanto, 2003, p.36). Sumber daya manusia di lembaga perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi lembaga. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama lembaga agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan di landasi kesetiaan dan ketaatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pijuastuti, 2014).

Hasibuan (2012, p.10) mengemukakan bahwa “manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Dalam definisi di atas memberikan penekanan dalam pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM yaitu sebagai sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan manajemen sumber daya tidak hanya bagaimana seseorang pimpinan mendesain sebuah formulasi tertentu dalam mengaplikasikan para sumber daya pegawai yang

ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Desain yang telah dibuat tersebut diharapkan mampu mengkoordinir keinginan-keinginan para pegawai serta koordinasi antara pegawai dan pimpinan serta antar pegawai. Melalui skema desain secara efektif dan efisien sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi di atas terlihat pula bahwa pengelolaan sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi itu sendiri. Dimana manusia adalah penggerak utama dari roda pergerakan organisasi (Pijuastuti, 2014).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang sebenar-benarnya sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, dimana data-data yang diperoleh digambarkan dan dijelaskan kemudian dipresentasikan dalam bentuk tabel yang dihubungkan dengan teoriteori yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan sehingga memudahkan penelitian untuk memahami struktur dari sebuah data.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 462, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas Panam 15 No. 155, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, dan Universitas Riau yang beralamat di Jalan Kampus Bina Wilayah KM 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data. Berikut metode yang digunakan. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk melakukan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013, p.231). Observasi, kegiatan pemuat perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan

seluruh alat indra (Margono, 2000). Dokumen, merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, menurut Sugiyono (2013, p.240).

Teknik analisis data yang dilakukan penulis yaitu Penyajian Data, Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau juga disebut penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam katagori uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1994) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2011, p.341). Kesimpulan dan verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapawal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012, p.345). Keabsahan data, untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong dalam Azka, 2017, p.15).

Triangulasi dalam penelitian ini yaitu berupa hasil yang diperoleh dari wawancara sumber data yang ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau yaitu Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau, Sekretaris, Sekretaris Eksekutif PD-IPI, Ketua Organisasi dan Keanggotaan serta 3 anggota, 3 Anggota pembinaan perpustakaan, Ketua Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Penerbitan

Ilmiah serta 4 anggota, Ketua Komisi Usaha Dana serta 2 anggota, Ketua Komisi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Minat Baca serta 3 anggota, Ketua Komisi Hubungan Kerjasama serta 4 anggota. Dari langkah tersebut dapat kita ketahui bersama derajat keabsahan datanya. Melalui berbagai perspektif ataupun pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran dalam melakukan penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah peran Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia pustakawan. Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian kesimpulannya, Sugiyono (2009, p.61). Populasi dalam penelitian ini diambil berdasarkan Laporan Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia PD (IPI) Provinsi Riau Tahun 2018-2019. Adapun jumlah keseluruhan populasi sebanyak 307 orang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh partisipasi Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau. sampel pada penelitian ini adalah jumlah pengurus dan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau sebanyak 28 orang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara yang dilakukan dengan berpatokan pada tiga indikator yang ada yaitu Kegiatan Ilmiah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Program Riau Pintar.

1. Kegiatan Ilmiah

Dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada 28 informan maka penulis mengambil jawaban dari ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau terkait pertanyaan wawancara tentang apa saja kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh organisasi IPI Provinsi Riau dari tahun 2017-2020 dan mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan ilmiah ada beberapa yang telah kami lakukan, tetapi kalau mengarah kepada sumber daya manusia pustakawan kayak untuk umum kami melakukan seminar nasional itu pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Universitas

Lancang Kuning itu pesertanya juga untuk umum pematernya saya dan juga bapak Rudi Hernanda dari Perpustnas, seminar rapat kerja pusat, rapat kerja daerah”.

Adapun bentuk atau kegiatan ilmiah yang telah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau lakukan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berjumlah 5 kegiatan, yang pertama itu Kongres Ikatan Pustakawan Daerah dan seminar tahun 2018, yang kedua Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau menghadiri Rapat Kerja Pusat IPI pada tanggal 4-6 Oktober 2017 di Yogyakarta, yang ketiga Musyawarah Daerah Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Provinsi Riau, yang keempat Rapat Kerja Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia dan Pembentukan Dewan Perpustakaan Provinsi Riau pada tahun 2017 dan yang kelima Seminar Meningkatkan Profesionalisme Pustakawan serta para pengelola perpustakaan, yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang bertempat di Aula Universitas Lancang Kuning, dengan narasumber bapak Rudi Hernanda dari perpustakaan nasional dan juga ketua dari Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau ibuk Dr. Hj. Rahima Erna.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengurus dan anggota organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Riau, bahwa kegiatan ilmiah yang mengarah ke perkembangan sumber daya manusia pustakawan belum maksimal karena kegiatan yang dilakukan belum banyak dan adapun kegiatan ilmiah yang baru dilakukan adalah Kongres Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah, Rapat Kerja Pusat IPI, Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, dan seminar meningkatkan profesionalisme pustakawan serta para pengelola perpustakaan.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada 28 informan maka penulis mengambil jawaban dari ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau terkait pertanyaan tentang apa saja kegiatan yang IPI lakukan atau ikuti dalam pendidikan dan pelatihan dari tahun 2017-2020 dan mengatakan bahwa :

“Kalau yang sifatnya pelatihan kami melakukan pelatihan perpustakaan, lalu ada mengadakan bimtek-bimtek tentang pengelolaan perpustakaan seperti bahan perpustakaanannya, pelayanannya, koleksinya juga ada ya”.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia, kegiatan yang telah IPI Provinsi Riau lakukan dalam pendidikan dan pelatihan ada 1 kegiatan yaitu Penjaringan Diklat Kepala Perpustakaan. Maksud disini pengelolaan perpustakaan yang mengikuti kegiatan ini pustakawan atau kepala perpustakaan sekolah negeri maupun dari kegiatan diatas itu sudah satu paket kegiatannya dilaksanakan empat kali dalam satu tahun. Dari tahun yang tertera kegiatan ini dilakukan tiga bulan sekali tergantung pustakawan yang mendaftar, jika ada yang mendaftar sekitar 20 pustakawan maka kami melaksanakan bimbingan, beda dengan kegiatan yang kita ikuti itu bersifat magang itu pihak perpustakaan yang mengadakan biasanya dilakukan pada bulan maret membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua minggu, dilakukan diklat ini yang pastinya akan menambah wawasan serta ilmu yang berguna bagi pustakawan agar bisa menciptakan ide-ide dalam mengelola perpustakaan.

Berdasarkan dari jawaban di atas beserta hasil observasi yang dilakukan, penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh IPI Provinsi Riau dalam pendidikan dan pelatihan yaitu memiliki 1 kegiatan yaitu Penjaringan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Maka dari itu hasil pengamatan penulis kegiatan diklat ini belum membantu dalam pengembangan sumber daya manusia pustakawan.

3. Program Riau Pintar

Dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada 28 informan maka penulis mengambil jawaban dari ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau tentang apa saja kegiatan IPI Provinsi Riau dalam meningkatkan minat baca dari tahun 2017-2020 dan mengatakan bahwa:

“Dalam organisasi IPI ini diantara yang tadi kamu tanyakan tadi mungkin ini lah yang banyak kegiatannya seperti mendongeng ke masyarakat, pekan aksi yang dilakukan setiap minggunya, lalu kami menggelar di CFD setiap minggunya, sosialisasi pemasyarakatan pustakawan, terus mengadakan pojok baca di halte-halte kami targetnya ya kepada anak usia dini, karna menumbuhkan minat baca memang harus dari dini ya”.

Ada satu kegiatan tentang program Riau pintar yang telah IPI lakukan yaitu meningkatkan minat baca masyarakat dengan cara mendongeng yang ditanamkan dari pendidikan anak usia dini, dengan adanya minat baca yang diterapkan mulai dari sekarang akan membuat masyarakat terutama pada anak usia dini lebih terbiasa akan membaca walaupun diawali dengan cara mendongeng yang nanti ujungnya akan mengarahkan keinginan mereka untuk membaca.

Berdasarkan dari jawaban di atas beserta hasil observasi yang dilakukan, penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh IPI Provinsi Riau dalam program Riau pintar yaitu meningkatkan minat baca dengan cara mendongeng yang lebih diutamakan kepada anak usia dini. Maka dari itu hasil pengamatan penulis kegiatan meningkatkan minat baca ini belum terlaksana dengan maksimal karena kegiatan yang dilakukan belum banyak dan kurang menyangkut kepada masyarakat.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia pustakawan secara keseluruhan belum maksimal. Hal ini diketahui dari tiga indikator yang ada di setiap indikatornya sedikit melaksanakan kegiatan, pertama Kegiatan Ilmiah, sudah melakukan 5 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan yaitu Kongres Ikatan Pustakawan Daerah dan seminar, Rapat Kerja Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Musyawarah Daerah Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Provinsi Riau, Rapat Kerja Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia dan Pembentukan Dewan Perpustakaan

Provinsi Riau, dan seminar meningkatkan profesionalisme pustakawan serta para pengelola perpustakaan. Kedua Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, sudah melakukan 1 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan yaitu Penjaringan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Ketiga Program Riau Pintar, sudah melakukan 1 kegiatan yang mengarah ke pengembangan sumber daya manusia pustakawan yaitu Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Terutama Pendidikan Anak Usia Dini dengan Cara Mendongeng.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi IPI Provinsi Riau dari tahun 2017 sampai 2020 dilihat dari indikator kegiatan ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan program riau pintar belum mengarah ke pengembangan kualitas sumber daya manusia pustakawan, karena kegiatan yang dilaksanakan belum banyak atau belum maksimal, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan hanya menghasilkan 7 kegiatan saja dari tahun 2017 sampai 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, (2020). *Sumber daya manusia : Pengertian menurut ahli, fungsi dan contoh*. MateriBelajar.Co.Id. <https://www.materi.carageo.com/sumber-daya-manusia/>
- Anggorowati, D. N., & Widayati, R. W. (2017). Peran forum pustakawan dalam pengembangan profesionalisme pustakawan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 13(2), 117-130. <https://doi.org/10.22146/bip.27499>
- Anita, A., Lestari, H., & Lituhayu, D. (2013). Peran diklat dalam peningkatan kualitas SDM di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 111-120. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1608/>
- Arikunto, S. (2015). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Basyral, H. (1998). *Kiprah pustakawan : Seperempat abad ikatan pustakawan indonesia*. Infomedika.

- Hidayat, A. (2018). *Pengertian simple random sampling, jenis dan contoh*. Uji Statistik. <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>
- IPI Provinsi Riau. (2018). *Laporan Kerja Ikatan Pustakawan Indonesia PD (IPI) Provinsi Riau 2018*. PD (IPI) Provinsi Riau.
- Maulana, K. A. (2013). Peran Ikatan Pustakawan Indonesia dalam peningkatan kualitas profesi pustakawan indonesia. <http://docplayer.info/44155828-Peran-ikatan-pustakawan-indonesia-dalam-peningkatan-kualitas-profesi-pustakawan-indonesia-khosyi-alfin-maulana.html>.
- Margono. (2000). *Metodologi penelitian pendidikan*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Pijuastuti, R. (2014). *Studi deskriptif pembinaan disiplin kerja pegawai bidang penyelenggaraan dan evaluasi diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). http://repository.upi.edu/13790/6/S_AD_P_1001761_Chapter3.pdf
- Republik Indonesia. (2007). "Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan". Sekretariat Negara.
- Rimbarawa, K. (2010). *Peran IPI dalam Meningkatkan Kompetensi Pustakawan Menuju Sertifikasi*. Sagung Seto
- Rumani, S. (2018). Ketika para pustakawan "melawan lupa" hari kelahiran organisasinya. KOMPASIANA. <https://s.id/osBU1>
- Satria, A. (2016). #7 Pengertian peran menurut para ahli / pakar. Materi Belajar. <https://www.materibelajar.id/2016/05/7-pengertian-peran-menurut-para-ahli.html>
- Siregar, M. R. A. (2016). Kompetensi yang harus dimiliki seorang pustakawan (pengelola perpustakaan). *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (e-Journal)*, 9(2), 211-222.
- Sudarsono, B. (2009). *Pustakawan cinta dan teknologi*. Sagung Seto.

- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Pengertian sampel menurut para ahli dan secara umum*. Alfabeta
- Sugiyono, (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Alfabeta.